

## ANALISIS YURIDIS KASUS KORUPSI SYAHRUL YASIN LIMPO MANTAN MENTERI PERTANIAN: KAJIAN KRONOLOGIS DAN HUKUM

Muhammad Ikhwan Nugraha Putra<sup>1</sup>, Ikhwan Nur Ramadhan<sup>2</sup>, Muhammad Saukhan Aulana<sup>3</sup>, Yehezkiel Musa Yudika Aritonang<sup>4</sup>, Ahmad Zangim<sup>5</sup>, Kuswan Hadji<sup>6</sup>

[muhammad.ikhwan.nugraha.putra@students.untidar.ac.id](mailto:muhammad.ikhwan.nugraha.putra@students.untidar.ac.id)<sup>1</sup>,  
[ikhwan.nur.ramadhan@students.untidar.ac.id](mailto:ikhwan.nur.ramadhan@students.untidar.ac.id)<sup>2</sup>, [muhammad.saukhan.aulana@students.untidar.ac.id](mailto:muhammad.saukhan.aulana@students.untidar.ac.id)<sup>3</sup>,  
[yehezkiel.musa.yudika.aritonang@students.untidar.ac.id](mailto:yehezkiel.musa.yudika.aritonang@students.untidar.ac.id)<sup>4</sup>, [ahmad.zangim@students.untidar.ac.id](mailto:ahmad.zangim@students.untidar.ac.id)<sup>5</sup>,  
[kuswan.hadji@untidar.ac.id](mailto:kuswan.hadji@untidar.ac.id)<sup>6</sup>

Universitas Tidar

**Abstrak:** Di tahun politik 2023, kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) adalah salah satu yang menarik perhatian publik. Kasus ini bermula dari penyelidikan KPK tentang berbagai dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang melibatkan SYL dan beberapa pejabat lainnya. Selama menjabat sebagai Menteri Pertanian, SYL diduga melakukan pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada 11 Oktober 2023, KPK menetapkan SYL sebagai tersangka dan menahannya pada 13 Oktober 2023. Dari informasi yang didapatkan, SYL diduga menerima dana dari pengusaha dan pejabat terkait Kementerian Pertanian untuk digunakan untuk membeli perhiasan, mobil, dan jam tangan mewah sebagai imbalan atas penempatan jabatan atau pembelian barang dan jasa dari departemen tersebut. Di dalam kasus ini, juga terdapat dugaan keterlibatan Ketua KPK Firli Bahuri, mantan anak buah SYL. Kasus ini juga menimbulkan kontroversi karena diduga berkaitan dengan perkembangan politik menjelang Pemilu 2023, di mana SYL merupakan salah satu pengusung calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang etika dan tata kelola pemerintahan, serta menunjukkan betapa kompleks dan berdampak besarnya dalam bidang hukum dan politik. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan fakta-fakta secara kronologis terkait permasalahan-permasalahan tersebut.

**Kata Kunci:** Korupsi, Menteri Pertanian, Ketua KPK.

**Abstract:** In the 2023 political year, the corruption case that ensnared former Agriculture Minister Syahrul Yasin Limpo (SYL) is one that has caught the public's attention. The case stems from a KPK investigation into various allegations of corruption in the Ministry of Agriculture involving SYL and several other officials. During his tenure as Minister of Agriculture, SYL was suspected of extortion, gratuity, and money laundering (TPPU). On October 11, 2023, the KPK named SYL as a suspect and detained her on October 13, 2023. From the information obtained, SYL allegedly received funds from businessmen and officials related to the Ministry of Agriculture to be used to buy jewelry, cars, and luxury watches in exchange for placement or purchase of goods and services from the department. In this case, there is also the alleged involvement of KPK Chairman Firli Bahuri, a former subordinate of SYL. The case also caused controversy because it was allegedly related to political developments ahead of the 2023 elections, where SYL is one of the bearers of presidential candidates and vice presidential candidates, Anies Baswedan and Muhaimin Iskandar. The case raises many questions about ethics and governance, and shows how complex and impactful it can be in the legal and political spheres. This article aims to describe the facts chronologically related to these issues.

**Keywords:** Corruption, Minister Of Agriculture, Chairman Of KPK.

## PENDAHULUAN

Kasus korupsi yang membawa mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yasin Limpo yang juga merupakan politikus Partai Nasdem menjadi sorotan publik. Kasus ini juga menimbulkan sebuah kontroversi karena diduga adanya keterlibatan Firli Bahuri yaitu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang merupakan mantan bawahan dari Syahrul yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. KPK membutuhkan waktu kurang lebih 10 bulan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penahanan. Pada tanggal 13 Oktober 2023, KPK menetapkan Syahrul Yasin Limpo, Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kasdi Subagyo, dan Muhammad Hatta, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Sebagai tersangka atas kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Mereka didakwa melanggar pasal 12 e dan 128 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP<sup>1</sup>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang kami lakukan yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan proses pengumpulan dan analisis beberapa data secara objektif untuk menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa. Data-data tersebut digunakan untuk menguji atau mengkonfirmasi teori dan asumsi<sup>2</sup>. Penulis mengumpulkan data-data sekunder yang berjenis bahan hukum primer dan berita sebagai bahan analisis untuk menjawab isu mengenai kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo mantan Menteri Pertanian. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah kumpulan aturan hukum terkait tindak pidana korupsi yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Untuk data selanjutnya kami dapat dari berita di berbagai sumber seperti CNN, CNBC, tempo, Kompas, liputan 6 yang membahas tentang kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo pada masa jabatannya sebagai Menteri Pertanian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus korupsi di negara ini seakan akan tidak pernah ada habisnya. Akhir akhir ini, permasalahan tersebut kembali mencuat. Kali ini terjadi pada seorang Menteri Pertanian bernama Syahrul Yasin Limpo. SYL diduga menjalankan korupsi bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana Kementerian Pertanian Muhammad Hatta. Hal ini diungkapkan oleh Pejabat Sementara Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu bahwa terdapat tiga klaster dugaan korupsi, yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pemerasan dalam jabatan, dan penerimaan gratifikasi. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan tindakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul, pergerakan, lokasi, sumber, disposisi, hak atas atau mengenai kepemilikan harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana<sup>3</sup>. Dalam kasus ini, Syahrul Yasin Limpo diduga menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang dengan cara menyelewengkan, membelanjakan, mengubah kekayaan yang diperoleh melalui pemerasan atau pemberian tip. Tindak pidana pencucian uang dihasilkan dengan membeli asset seperti mobil, rumah, tanah, saham, dll atau dengan menyimpan uang di rekening bank dengan mengatasnamakan pihak ketiga seperti anggota

---

<sup>1</sup> Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).

<sup>2</sup> Handayani, D. M. (2019). Korupsi. *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, 1(1), 1-8.

<sup>3</sup> Rusnaedy, Z., & Purwaningsih, T. (2018). Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015. *Jurnal Politik*, 3(2), 5.

keluarga, saudara atau bawahan<sup>4</sup>.

Pemerasan dalam jabatan merupakan tindakan menggunakan wewenang atau kekuasaan pejabat publik untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu. Dalam kasus ini, Syahrul Yasin Limpo melakukan pemerasan terhadap sejumlah pihak yang berkepentingan dengan program dan kegiatan Kementerian Pertanian, antara lain mitra kerja, pemasok barang dan jasa, serta pegawai. Pemerasan ini dilakukan dengan menggunakan cara mengurangi pembayaran atau menahan, mengancam akan menahan pengakuan atau bantuan, atau menjanjikan penunjukan atau promosi. Hasilnya, Syahrul diduga menerima barang mewah, uang tunai, dan asset selain puluhan miliar rupiah<sup>5</sup>.

Penerimaan gratifikasi merupakan tindakan yang mencakup penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatan atau wewenang pejabat publik. Dalam kasus ini Syahrul Yasin Limpo diduga telah menerima gratifikasi yang dilakukan sejumlah pihak berkepentingan dengan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pertanian, seperti alokasi anggaran, pemberian izin impor, atau penunjukan rekanan. Gratifikasi ini berupa barang mewah, uang tunai, dan asset senilai puluhan miliar rupiah. Diawali pada Juni 2023, KPK memberitahukan jika sedang melakukan penyelidikan sebuah kasus dugaan korupsi yang terdapat pada Kementerian Pertanian. KPK pun melakukan pemanggilan kepada Syahrul Yasin Limpo selaku menteri pertanian agar memberi keterangan pada tanggal 16 Juni 2023. Namun, pemanggilan tersebut ditolak lantaran Syahrul melakukan pertemuan para Menteri Pertanian anggota G20 di India. Syahrul akhirnya memenuhi panggilan tersebut setelah kembali ke Indonesia pada 19 Juni 2023. Ia diperiksa penyidik terkait dugaan korupsi selama 3 jam di Kementerian pertanian.

Berita mengenai penetapan terhadap tersangka SYL berlanjut dengan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di rumah dinas pada tanggal 28 September 2023. Dari penggeledahan yang dilakukan, KPK menyita uang senilai Rp 30 miliar yang berupa rupiah dan mata uang asing. Selain itu, KPK melakukan penyitaan bukti transaksi keuangan dan pembelian barang berharga. Sebelumnya KPK juga melakukan penggeledahan di rumah Syahrul Yasin Limpo yang berada di kota Makassar dan menyita sebuah mobil audi a6. Pada tanggal 11 Oktober 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi secara terbuka Syahrul Yasin limpo sebagai tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul diduga melakukan tiga jenis tindak pidana korupsi yaitu pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan pencucian uang. KPK juga menetapkan dua orang lainnya yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak, Syahrul diduga menerima sekitar Rp13,9 miliar dari Pejabat Kementerian Pertanian melalui Kasdi dan Hatta sebagai imbalan atas penempatan jabatan atau pembelian produk dan jasa dari departemen tersebut. Selain itu, Syahrul diduga menerima sumbangan sukarela sebesar Rp1,5 miliar dari seorang pengusaha di bidang alat dan mesin pertanian. Kemudian uang tersebut digunakan SYL untuk membeli barang-barang berharga seperti mobil, jam tangan, dan perhiasan.

KPK menahan Syahrul di Gedung KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan, selama 20 hari pertama. Syahrul mengajukan banding awal ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan surat mencuri mencurigakan tersebut. Namun hakim membatalkan kasus tersebut pada tanggal 14 November 2023. Hakim berpendapat, keputusan tersangka Syahrul sudah berdasarkan

---

<sup>4</sup> Hartini, S., Mustika, D. A., Banulita, M., Ferarry, A. A. I., & Purwoto, A. (2024). PENANGKAPAN TERHADAP TERSANGKA SYAHRUL YASIN LIMPO OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK). *YUSTISI*, 11(1), 1-7.

<sup>5</sup> Budiman, F., Kirana, M. L., Agung, B. A. S., Astapia, N., & Hadji, K. (2024). KASUS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN KETUA KPK FIRLI BAHURI, DALAM CAMPUR TANGAN MENUTUPI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DI LAKUKAN OLEH MENTERI PERTANIAN SYAHRUL YASIN LIMPO. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(3), 101-110.

proses dan bukti yang cukup<sup>6</sup>. Kasus tersebut juga menuai kontroversi karena diduga ada keterlibatan Ketua KPK Firli Bahuri yang merupakan mantan anak buah Syahrul saat menjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Firli diperiksa polisi sebagai saksi terkait pemerasan yang dilakukan Syahrul terhadap pengusaha tersebut. Firli membantah ada hubungan apa pun antara dirinya dan Syahrul, serta menyebut belum menerima uang sepersen pun dari Syahrul. Peristiwa ini juga berdampak pada Partai Nasdem yang merupakan partai pengusung presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Anggota Nasdem menyebut persoalan ini menyangkut Syahrul dan tidak ada kaitannya dengan partai Anggota Nasdem pun menilai kasus ini tidak akan mempengaruhi kelayakan Anies-Cak Imin pada pemilu 2024.

## KESIMPULAN

Syahrul Yasin Limpo, Kasdi Subagyo, dan Muhammad Hatta telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Syahrul Yasin Limpo didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan menyamarkan sumber kekayaan yang diduga berasal dari pemerasan atau penerimaan tip. Selain itu, ia diduga melakukan pemerasan dalam jabatan terhadap orang-orang yang terlibat dalam program dan kegiatan Kementerian Pertanian serta menerima gratifikasi dari orang-orang yang terlibat dalam keputusan atau kebijakan Kementerian Pertanian. Diduga bahwa Syahrul menerima uang dari pengusaha dan pejabat Kementerian Pertanian, yang kemudian digunakan untuk membeli mobil, jam tangan, dan perhiasan mewah. Di rumah mereka, KPK melakukan pengeledahan dan menyita sejumlah bukti, termasuk uang miliaran rupiah, transaksi keuangan, dan barang berharga. Meskipun Syahrul ditangkap, dia mengajukan banding, yang kemudian ditolak oleh pengadilan karena tidak ada bukti yang cukup. Selain itu, ada kontroversi tentang dugaan bahwa Ketua KPK Firli Bahuri, yang diperiksa oleh polisi sebagai saksi dalam kasus pemerasan yang melibatkan Syahrul, terlibat dalam kasus tersebut. Meskipun kasus ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan tentang keterlibatan berbagai pihak, lembaga terkait terus melakukan penegakan hukum dan investigasi. Selain itu, berdampak pada masalah politik tentang kelayakan partai dan pemimpin tertentu, meskipun dari perspektif anggota Partai Nasdem percaya bahwa masalah ini tidak akan memengaruhi kelayakan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024

## Saran

Saran yang penulis berikan adalah lembaga penegak hukum seperti KPK harus mementingkan profesionalitas, independensi, dan lebih berani melakukan penindakan terhadap kasus korupsi. Penegakan hukum juga harus dilaksanakan secara terbuka, adil, dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Yang kedua mengenai transparansi terhadap keuangan negara juga perlu dilakukan agar tidak terjadi kasus yang sama. Yang ketiga adalah pentingnya pendidikan mengenai etika dan bahaya korupsi sedini mungkin. Terakhir, mungkin bisa dilakukan pemberian hadiah atau *reward* terhadap pihak yang berperan dalam pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi.<sup>7</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

Budiman, F., Kirana, M. L., Agung, B. A. S., Astapia, N., & Hadji, K. (2024). KASUS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN KETUA KPK FIRLI BAHURI, DALAM CAMPUR TANGAN MENUTUPI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DI LAKUKAN OLEH MENTERI PERTANIAN SYAHRUL YASIN LIMPO. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(3), 101-110.

---

<sup>6</sup> Budiman, F., Kirana, M. L., Agung, B. A. S., Astapia, N., & Hadji, K. (2024). KASUS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN KETUA KPK FIRLI BAHURI, DALAM CAMPUR TANGAN MENUTUPI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DI LAKUKAN OLEH MENTERI PERTANIAN SYAHRUL YASIN LIMPO. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(3), 101-110.

- Budiman, F., Kirana, M. L., Agung, B. A. S., Astapia, N., & Hadji, K. (2024). KASUS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN KETUA KPK FIRLI BAHURI, DALAM CAMPUR TANGAN MENUTUPI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DI LAKUKAN OLEH MENTERI PERTANIAN SYAHRUL YASIN LIMPO. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(3), 101-110.
- Dzulfaroh, AN& Nugroho, RS. (2023, 12 Oktober). Resmi Tersangka Korusi, Ini Profil dan Kekayaan Syahrul Yasin Limpo. Diakses pada 22 November 2023, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/12/123000965/resmi-tersangka-korupsi-ini-profil-dan-kekayaan-syahrul-yasin-limpo>
- Handayani, D. M. (2019). Korupsi. Pengarah: *Jurnal Teologi Kristen*, 1(1), 1-8.
- Hartini, S., Mustika, D. A., Banulita, M., Ferarry, A. A. I., & Purwoto, A. (2024). PENANGKAPAN TERHADAP TERSANGKA SYAHRUL YASIN LIMPO OLEH KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI (KPK). *YUSTISI*, 11(1), 1-7.
- Rozie, Fachrur. (2023, 6 November). Syahrul Yasin Limpo, Firli Bahuri dan Dugaan Pemerasan di Kasus Korupsi Kementan. Diakses pada 22 November 2023, dari <https://www.liputan6.com/news/read/5416211/syahrul-yasin-limpo-firli-bahuri-dan-dugaan-pemerasan-di-kasus-korupsi-kementan>.
- Rusnaedy, Z., & Purwaningsih, T. (2018). Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015. *Jurnal Politik*, 3(2), 5.
- Saputra, Yudha Eka. (2023, 14 Juni). Hasil Gelar Perkara KPK: Syahrul Yasin Limpo Diusulkan Jadi Tersangka. Diakses pada 22 November 2023, dari <https://nasional.tempo.co/read/1737169/hasil-gelar-perkara-kpk-syahrul-yasin-limpo-diusulkan-jadi-tersangka>
- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).